



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN SINGARAJA-GILIMANUK, DESA PENYABANGAN, KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG, BALI (81155)

TELEPON (0362) 3363745

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbrblpp.gondol@kkp.go.id

**SURAT PERNYATAAN
BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUTFI JAUHARI, S.St.Pi., M.Si
NIP : 198108262003121004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Plt Kepala Balai
Unit Kerja : Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan ini dibuat, saya belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena status jabatan saya belum definitif dan/atau masih menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt.).

Saya menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan sebagai pejabat definitif dan termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan, maka saya bersedia dan berkomitmen untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gondol, 19 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,
Plt. Kepala BBRBLPP,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Lutfi Jauhari, S.St.Pi., M.Si



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Wawan Andriyanto
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 454143

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 615.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/56 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 317.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC/NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER / ULTIMATE Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.331.694

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 976.331.694

III. HUTANG Rp. 250.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 726.331.694

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Ida Komang Wardana
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 465713

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.910.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.300 m2/400 m2 di KAB / KOTA BULELENG, Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/20 m2 di KAB / KOTA BULELENG, Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 222.500.000

1. MOBIL, Toyota Vios Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 83.000.000
2. MOBIL, Suzuki Baleno Tahun 2008, WARISAN Rp. 49.000.000
3. MOTOR, Honda SupraVit Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 69.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 186.552.063

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 197.630.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 14.500.000



Sub Total	Rp.	2.575.182.063
III. HUTANG	Rp.	15.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.559.682.063

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Kadek Adi Chandra Kusuma**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **250464**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.418.750.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/280 m2 di KAB / KOTA BULELENG, Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 218.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 139.900.000**

1. MOBIL, Suzuki Ertiga GX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	93.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	120.000.000
Sub Total	Rp.	1.771.750.000
III. HUTANG	Rp.	214.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.557.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUH ASGAR
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 236552

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/80 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.125.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.125.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER/LE BE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.562.986

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 526.187.986

III. HUTANG Rp. 240.321.635

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 285.866.351

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.